

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdoellah, Y Awan. Rusfiana, Yudi. (2016). *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.CV

Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press

Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Afabeta

Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Darmawan E. (2009). *Ruang Publik Dalam Arsitektur Kota*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP

Dunn, N William. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GAJAH MADA UNIVERSITY PRESS

Gusti Bagus, Arjana. (2013). *Geografi Lingkungan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Irwan, Z.D. (2007). *Prinsip Ekologi: Ekosistem, Lingkungan Dan Pelestariannya*. Jakarta: Bumi Aksara

Jamal. (2005). *Tantangan Lingkungan Dan Lansekap Hutan Kota*. Jakarta: Bumi Aksara

Moleong, Lexy. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

Sitepu, P. Anthonius. (2012). *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Mardiasmo.(2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi

Sintia, Mona. Murhananto. (2004). *Mendesain, Membuat Dan Merawat Taman Rumah*. Jakarta: PT. Agromedia Pustaka

Sudaryo, Yoyo. Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofiati. (2021). *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi

Suharto, Edy. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Jakarta: ALFABETA

Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Wildavsky, et.all. (1998). *The New Politics of the Budgetary Process*. Scott Foresman

### **Jurnal**

Azis, Nyimas Latifah Letty. 2016. *POLITIK ANGGARAN DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI INDONESIA*. Jurnal Masyarakat Indonesia, 42(1). 51-64. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Habibi, Muhammad. Rita Kalalinggi dan Anwar Alaydrus. (2018). *Politik Anggaran Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Calon Kepala Daerah Incumbent Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kota Samarinda*, *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 1 (1), 269–282

Noer Fauzi, R . Yando Zakaria. (2013). *Bahan Kuliah Politik Keuangan Negara*

### **Skripsi**

Abdillah, Junaidy. (2005). *Pola Penyebaran Taman Kota dan Peranannya Terhadap Ekologi Di Kota Jepara*. Universitas Negeri Semarang

Hermansyah, Deri. (2020). *Pengaruh Rencana Program Kerja, Citra Bakal Calon Bupati, dan Popularitas Terhadap Elektabilitas Bakal Calon Bupati (Studi Kasus: Pada Himawan Hanindito Pramono di Pilkada Kediri Tahun 2020)*. Universitas Brawijaya

## Internet

Laporan Kebijakan Umum APBD (KUA) DKI Jakarta 2021.

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR  
MASA JABATAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2013-  
2017.

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR  
MASA JABATAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2007-  
2012.

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR  
MASA JABATAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2002-  
2007.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang  
Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2005 - 2025.

*RPJMD PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022.*

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN  
2007 TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Pedoman Wawancara**  
**Pedoman Wawancara Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi-D Fraksi PDI-P**

<b>Pertanyaan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan anggaran DKI Jakarta periode 2017– 2022 ?</li><li>2. Apa saja faktor yang dijadikan pertimbangan dalam tahapan perencanaan pengelolaan anggaran Periode 2017 – 2022, dan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut ?</li><li>3. Apakah terdapat dominasi atau unsur kepeningan suatu pihak dalam sistem perumusan anggaran apbd dki 2017-2022 ?</li><li>4. Bagaimana sikap Fraksi PDIP selaku Partai Oposisi pada saat tahap perancangan kebijakan Pembangunan Taman Maju Bersama hingga Terealisasi ?<ol style="list-style-type: none"><li>A. Jika menyetujui, apa yang dijadikan dasar pertimbangan ?</li><li>B. Jika menolak, apa yang dijadikan dasar pertimbangan ?</li></ol></li><li>5. Apa tujuan dan manfaat implementasi kebijakan Pembangunan Taman Maju Bersama bagi masyarakat DKI Jakarta disamping pemenuhan ruang terbuka hijau ?</li><li>6. Apakah kebijakan pembangunan taman maju bersama merupakan sebuah kebijakan populis pada masa pemerintahan Anies Baswedan ?</li></ol>

**Pedoman Wawancara Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi-C**  
**Fraksi Gerindra**

<b>Pertanyaan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah Bapak mengetahui program Pembangunan Taman Maju Bersama DKI Jakarta ?</li><li>2. Bagaimana sikap Fraksi Gerindra selaku Partai Pengusung Anies Baswedan pada saat tahap perancangan kebijakan Pembangunan Taman Maju Bersama hingga Terealisasi ?<ol style="list-style-type: none"><li>A. Jika menyetujui, apa yang dijadikan dasar pertimbangan ?</li><li>B. Jika menolak, apa yang dijadikan dasar pertimbangan ?</li></ol></li><li>3. Apakah terdapat kesulitan dalam proses perencanaan alokasi anggaran periode 2017 – 2022 serta implementasinya ?</li><li>4. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan realisasi alokasi anggaran DKI Jakarta periode 2017 – 2022 ?</li></ol>

## **Pedoman Wawancara Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan BAPPEDA DKI Jakarta**

<b>Pertanyaan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apa yang menjadi landasan atau regulasi dalam perencanaan pengelolaan anggaran khususnya pada bidang perencanaan dan pembangunan Di DKI Jakarta periode 2017 – 2022 ?</li><li>2. Bagaimana sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan anggaran DKI Jakarta periode 2017 – 2022 ?</li><li>3. Siapa saja yang terlibat dalam tahap perencanaan pengelolaan anggaran DKI Jakarta dalam periode 2017-2022 ?</li><li>4. Apakah Gubernur DKI Jakarta sebagai peranan penting memiliki hak untuk menentukan skala prioritas atas penggunaan anggaran APBD dalam periode jabatannya khususnya tahun 2017 – 2022 ?</li><li>5. Apa saja faktor yang dijadikan pertimbangan dalam proyeksi anggaran khususnya yang tertuang dalam RPJMN DKI Jakarta Periode 2017 - 2022?</li><li>6. Bagaimana sistem dan prosedur pertanggung jawaban pengelolaan anggaran khususnya periode 2017-2022?</li></ol>

## **Pedoman Wawancara Kepala Sub Koordinator Urusan Program dan Pelaporan Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta**

<b>Pertanyaan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apa landasan atau regulasi pembangunan Taman Maju Bersama?</li><li>2. Apa urgensi pembangunan Taman Maju Bersama?</li><li>3. Apa perbedaan Taman Maju Bersama dengan taman sebelumnya periode Gubernur terdahulu, dimana sudah muncul sejak era Gubernur Sutiyoso?</li><li>4. Bagaimana proses program/kebijakan ini dari perumusan hingga terealisasi?</li><li>5. Berapa besaran anggaran untuk pembangunan Taman Maju Bersama?</li><li>6. Sejak perencanaan hingga terealisasi berapa banya Taman Maju Bersama terbangun dan apakah sudah mencapai target implementasi?</li><li>7. Mengapa pembangunan Taman Maju Bersama lebih banyak di wilayah Jakarta Timur?</li><li>8. Apakah kebijakan pembangunan Taman Maju Bersama termasuk kebijakan populis?</li><li>9. Apakah program ini merupakan program yang diutamakan dalam periode kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan diberikan hak khusus tersendiri dalam APBN?</li></ol>

Transkrip Wawancara

Narasumber : Hj. Yuke Yurike, ST., MM

Jabatan : Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D Fraksi PDI-Perjuangan

Waktu dan Tempat : Kantor DPRD DKI Jakarta, 19 Desember 2022

<p>1. Sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan anggaran DKI Jakarta periode 2017– 2022</p>	<p>Mengikuti aturan yang mengatur bagaimana pengelolaan keuangan daerah itu sudah ranah eksekutif, dan kita hanya mengikuti apa yang sudah menjadi proses dan memberikan masukan berdasarkan hasil resesn dan aspirasi masyarakat sebelum RKPD. Nanti dimasukan oleh BAPPEDA semua aspirasi masyarakat sesuai nomenklatur dan di plot, dibahas bersama DPRD dan eksekutif.melalui beberapa tahap ada yang di komisi, banggar dan akhirnya diputuskan di badan anggaran. jadi untuk legislative, memasukan aspirasi masyarakat yang belum terinput oleh eksekutif untuk masuk dalam RKPD sampai pembahasn akhir kita mengecek apa yang menjadi usulan dan me nyesuaikan sesuai anggaran yang kita punya.</p>
<p>2. Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam tahapan perencanaan pengelolaan anggaran Periode 2017 – 2022, dan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut</p>	<p>Kalau bahas anggaran kan cuma judul yang tidak mendetail jika tidak ditanya mendalam dan gasampai rincian tiga yang mendetail sampai pembelianya, sehingga harus ditanyakan satu persatu agar tidak ada double anggaran agar yang di sahkan efektif dan terpkai. Peran kita menelaah dalam pembahasan secara kebutuhan anggaran jangan sampai yang penting jadi terlewat karena tidak ada nomenklatur atau double anggaran. untuk fokus di Komisi D pada tahun 2017-2021 itu di banjir, kebersihan, pertamanan, perumahan, kemacetan, penataan utilitas, air bersih.</p>
<p>3. Dominasi atau unsur kepeningan suatu pihak dalam sistem perumusan anggaran apbd dki 2017-2022</p>	<p>Kalau dominasi atau apa kita gatau yang jelas untuk team anggara kepala teamnya Sekda dan atasnya lagi Gubernur, jadi yang tau disana tapi pasti sebagai kepala daerah dia memberikan peran mengarahkan yang harus dikerjakan dalam periode jabatannya dan diterjemahkan oleh bawahannya. Dominasi saya tidak tahu ini termasuk atau tidak yang penting tujuanya untuk masyarakat dan sudah dipresentasikan pihak terkait untuk perencanaan. Era pak Anies sandi itu terlihat ada pembagian tugas ekonomu dan BUMD pak sandi dan pak anies yang lain. saat ditinggal pak sandi, pak anies sendiri bersama team TAPD dan peran TGUPP sangat lebih tiap kebijakan. Karena pak Anies harus melalui TGUPP dulu baru kebawah, saya tidak tahu mungkin niat Pak Anies ini bagus sebagai penerjemah namun mungkin terjadi peran-peran diluar wewenang dia karena bawahannya menerjemahkan arahan dia. Mengakibatkan banyak missskomunikasi, jadi rancu dalam menerjemahkan dan membuat kita berkesan tidak megang kebawah padahal programnya bagus tapi kadang hasilnya tidak maksimal, itu yang membuat beberapa programnya tidak maksimal dan saat dibantu oleh wakilnya terbaru Pak Riza membantu dalam media dan komunikasi lebih baik terbuka.</p>

	Kesimpulan terkait dominasi namanya kepala daerah ya pasti usulan atau ide gagasan awal dari beliau, namun masukan kepada beliau dari siapa kita kan tidak tahu dan bagaimana usulanya diterjemahkan menjadi suatu program diajukan untuk dianggarkan kan diskusinya ada disana team TAPD dan eksekutif.
4. Sikap Fraksi PDIP selaku Partai Oposisi pada saat tahap perancangan kebijakan Pembangunan Taman Maju Bersama hingga Terealisasi	Pada dasarnya kita mengacu pada janji politik yang tertuang di RPJMD sebagai partai oposisi mengejar untuk direalisasikan atau tidak serta kita perjuangkan hal dari fraksi kami terhadap kaum termajinal harus pro rakyat. Kalau pada saat itu terkait kebijakan Pembangunan Taman Maju Bersama tidak bisa kita tolak atau terima karena memang sudah direncanakan paling kita hanya bisa mengkritisi saat awal kenapa yang sudah ada tetapi tidak diteruskan (RPTRA), kalau memang mau buat yang baru yang lama dirawat jangan terbengkalai. Fraksi kami lebih menekankan pada taman dan ruang terbuka hijau dan masyarakat bisa berkumpul dan fasilitas umum, mohon merata di setiap wilayah untuk pembangunannya perkelurahan minimal ada berdasarkan masukan masyarakat sehingga anggarannya. Singkatnya fokus pada fungsi, efektivitas anggaran dan pemerataan pembangunan Taman Maju Bersama
5. Tujuan dan manfaat implementasi kebijakan Pembangunan Taman Maju Bersama bagi masyarakat DKI Jakarta disamping pemenuhan ruang terbuka hijau	Dasarnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta dan luasnya bisa disesuaikan untuk konsepnya lebih ke taman dan penghijauan dan dibawah dinas kehutanan dan pertamanan. Fungsinya sebagai penyerapan air, sanitasi air, mengurangi polusi udara, sumur resapan dan tergantung situasi wilayah sekitar pembangunan taman disamping penyeimbang aktivitas perkotaan untuk lingkungan dan masyarakat.
6. Kebijakan pembangunan taman maju bersama merupakan sebuah kebijakan populis pada masa pemerintahan Anies Baswedan	Untuk khusus Taman Maju Bersama di era pak Anies ya jelas pasti populis karena manfaatnya langsung bersentuhan dengan masyarakat dan berasa. Dan bisa meningkatkan citra beliau karena manfaatnya benar-benar terasa di masyarakat

**Narasumber** : Adnani Taufiq S.Sos

**Jabatan** : Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi C Fraksi Gerindra

**Waktu dan Tempat** : Kantor DPRD DKI Jakarta, 5 Januari 2023

1. Pengetahuan Program Pembangunan Taman Maju Bersama DKI Jakarta	Ya saya mengetahui program Pembangunan Taman Maju Bersama saat periode Bapak Anies Baswedan
---	---

2. Sikap Fraksi Gerindra selaku Partai Pengusung Anies Baswedan pada saat tahap perancangan kebijakan Pembangunan Taman Maju Bersama hingga Terealisasi ?	Kami menyetujui dan mendukung realisasi program tersebut karena memang tujuannya baik untuk pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta juga sarana bermain dan rekreasi masyarakat sekitar
3. Peran pemerintah daerah dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan realisasi alokasi anggaran DKI Jakarta periode 2017 – 2022 ?	Sebenarnya sudah sangat terbuka ya saat proses pembahasan anggaran pun sudah terbuka, untuk laporan realisasi juga sudah ada dalam portal bappeda terkait apbd,lkpj dan alokasinya.
4. Kesulitan dalam proses perencanaan alokasi anggaran periode 2017 – 2022 serta implementasinya	Kesulitan mungkin kemampuan anggaran dan saat sudah ditetapkan distribusi dana itu yang kadang telat sehingga banyak program tertunda karena memang dananya belum tersedia. Untuk perencanaan kita analisis mendalam tiap nomenklatur agar anggaran benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya digunakan maksimal

**Narasumber : Feirully Irzal**

**Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan  
Pembangunan BAPPEDA DKI Jakarta**

**Waktu dan Tempat : Kantor BAPPEDA DKI Jakarta, 23 Desember 2022**

1. Landasan atau regulasi dalam perencanaan pengelolaan anggaran khususnya pada bidang perencanaan dan pembangunan Di DKI Jakarta periode 2017 – 2022	Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 17 diamanatkan setiap daerah menyusun pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan dengan tahapan dan pedoman tertera. Dan merujuk pada aturan di atasnya
2. Sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan anggaran DKI Jakarta periode 2017 – 2022	Tahapan untuk penyusunan rencana pembangunan tahunan secara berjenjang dimulai dari rembuk RW ditingkat Rukun Warga setelah itu naik ke tingkat kelurahan selanjutnya ke tingkat kecamatan. Lalu ke tingkat walikota terdapat, MUSRENBANG tingkat walikota dimana perwakilan tiap stakeholders wilayah diundang untuk menyampaikan pendapatnya dan pemerintah menyampaikan rencananya dan tercipta proses diskusi dan kesepakatan lalu berlanjut ke tingkat provinsi. Isi rembuk tersebut merupakan sebuah diskusi apa yang akan kita laksanakan pada tahun depan. Setelah proses tersebut dihimpun dari masukan warga selanjutnya jadi draft Rancangan Kerja Pemerintah Daerah/RKPD. Setelah RKPD selesai ditetapkan dengan peraturan Gubernur lalu masuk ke fase penganggaran atau disebut dengan KUA PPAS/Kebijakan

	<p>Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dimana secara makro kebijakan umum anggaran tahun depan akan seperti apa, berapa belanja, berapa pendapatan, berapa pengeluaran, berapa pembiayaan. Setelah itu ke PPAS/Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dimana masing-masing program yang telah disusun dalam RKPD akan mendapatkan alokasi anggaran di dalamnya. Setelah KUA PPAS selesai akan disepakati bersama dengan DPRD, antara eksekutif dan DPRD akan menyepakati bersama besaran KUA PPAS setelah disepakati masuk ke fase RAPBD. Setelah RAPBD dibahas bersama DPRD kemudian disepakati masuk ke fase Kementrian Dalam Negeri untuk validasi atau persetujuan. Lalu kembali lagi ke BAPPEDA untuk perbaikan dan saran dari PERMENDAGRI kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah</p>
<p>3. Yang terlibat dalam tahap perencanaan pengelolaan anggaran DKI Jakarta dalam periode 2017-2022</p>	<p>Dalam tahap perencanaan BAPPEDA dengan seluruh perangkat daerah kemudian di tahap penganggaran BPKD dan seluruh perangkat daerah. Kemudian dalam pembahasan KUA PPAS terdapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan wakil ketuanya BAPPEDA, BPKD, BAPPENDA, serta asisten terkait untuk pembahasan bersama DPRD DKI JAKARTA. Dalam pembahasan RAPBD terdapat Komisi A bidang Pemerintahan, Komisi B bidang Perekonomian, Komisi C bidang Keuangan, Komisi D bidang Pembangunan dan Komisi E bidang Kesra DPRD DKI Jakarta untuk membahas bersama terkait kegiatan yang diusulkan berdasarkan tupoksi tiap komisi</p>
<p>4. Gubernur DKI Jakarta sebagai peranan penting memiliki hak untuk menentukan skala prioritas atas penggunaan anggaran APBD dalam periode jabatannya khususnya tahun 2017 – 2022</p>	<p>Kalau bentuknya PERDA merupakan hasil kesepakatan dimana dibahas bersama antara eksekutif dan legislative. Dalam pembahasan di DPRD ada dinamikanya, ada yang bertambah, berkurang, hilang, baru itu berdasarkan hasil kesepakatan. Namun dalam proses tersebut Gubernur tidak ikut, jadi tidak langsung mengutarakan arahan dalam proses tersebut. karena terdapat tim TAPD yang membahas bersama DPRD setelah disepakati dibahas kembali dengan pak Gubernur. jadi sifatnya bukan personal jadi ini rencana pembangunan DKI Jakarta bukan rencana pembangunan Pak Anies Baswedan</p>
<p>5. Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam proyeksi anggaran khususnya yang tertuang dalam RPJMN DKI Jakarta Periode 2017 - 2022</p>	<p>Pertama proyeksi pendapatan, kita tanya terkait bagaimana pertumbuhan perekonomian DKI Jakarta ditahun depan (tidak pernah lebih dari 6% ya, pernah 7% tetapi dulu lalu inflasi kita berapa) dari situ kita bisa memproyeksikan berapa pertumbuhan ekonomi kita tahun depan dan berapa pendapatan kita dari pajak. Kemudian dari belanja yang mana saja akan dibelanjakan terlebih dahulu diutamakan pendidikan dan kesehatan sisanya baru pembangunan (baik pembangunan fisik, pembangunan manusia, pembangunan ekonomi) sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD arahnya mau kemana, dan target-target yang ingin dicapai. Kemudian pertimbangan pembiayaan, jika terdapat kekurangan dana keuangan dicari solusinya dengan berhutang misalnya dari pinjaman pemerintah pusat. Itu yang dijadikan pertimbangan untuk penetapan anggaran tiap tahunnya</p>

<p>6. Sistem dan prosedur pertanggung jawaban pengelolaan anggaran khususnya periode 2017-2022</p>	<p>Setiap tahun ada yang namanya audit dari BPK ada laporan keuangan pemerintah daerah/LKPD itu diterbitkan dan disusun, kemudian dibahas bersama DPRD DKI Jakarta lalu keluarlah PERDA terkait LKPD. Menjelaskan proyeksi realisasi keuangan dan target selama periode setahun. Ada juga LKPI/Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur menjelaskan target tahunan di tahun itu apakah tercapai, apa saja indikator yang tercapai di tahun itu, yang ujungnya dikirimkan ke DPRD. Dari DPRD diberikan rekomendasi terkait penyempurnaan kinerja gubernur pada tahun selanjutnya. Hasil rekomendasi Gubernur tersebut dijadikan pertimbangan untuk perbaikan kinerja tahun selanjutnya</p>
--	---

**Narasumber** : **Eko Cahyono**  
**Jabatan** : **Kepala Sub Koordinator Urusan Program dan Pelaporan Dinas  
Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta**  
**Waktu dan Tempat** : **Kantor Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta,  
18 Januari 2023**

<p>1. Landasan atau regulasi pembangunan Taman Maju Bersama</p>	<p>Regulasi umum harus melihat aturan diatas pertama UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan ruang, yang mengisyaratkan keharusan memelihara kelangsungan kehidupan ruang darat,laut,udara dan bumi menjadi sebuah kesatuan wilayah karena merupakan tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan. Lalu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008 Tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Selanjutnya Permen ATRKBP 14 Tahun 2022 Tentang setiap wilayah di Indonesia wajib menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 30% dan 20% diambil dalam RTH Publik(yang dimiliki pemerintah daerah) dan 10% RTH Privat</p>
<p>2. Urgensi pembangunan Taman Maju Bersama</p>	<p>Jakarta membutuhkan Ruang Terbuka Hijau 6kali luas monas dimana itu besar sekali mengapa masih akan terus berkelanjutan pembangunan tersebut dan tidak akan berhenti saat target tercapai. Untuk saat ini untuk besaran RTH DKI Jakarta sebesar 5,1% dari 20%</p>
<p>3. Perbedaan Taman Maju Bersama dengan taman sebelumnya periode Gubernur terdahulu, dimana sudah muncul sejak era Gubernur Sutiyoso</p>	<p>Perbedaan TMB dengan Taman Interaktif, jikalau Taman interaktif pembangunan dan konsep murni dari dinas pertamanan dan kehutanan masyarakat sudah terima jadi, namun secara desain bangunan ada kemiripan sedikit. Sedangkan TMB melibatkan masyarakat sejak awal pembangunan melalui FGD 123 sehingga realisasinya benar-benar sesuai untuk pemanfaatan warga sekitar. Selanjutnya perbedaan RPTRA dan TMB, dimana RPTRA adalah sebuah bangunan yang cukup besar dan tidak diperbolehkan ditempatkan di ruang terbuka hijau apabila sudah melebihi kapasitas 30% tadi. RPTRA lebih memprioritaskan ke fungsi sosial seperti yang tercantum dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta No.123 Tahun 2017 Tentang standarisasi kebutuhan RPTRA, dimana bangunannya ada ruang menyusui, aula, PKK Mart, Perpustakaan, gudang fungsinya lebih diperuntukan</p>

	interaksi anak dan ibu. Berbeda dengan taman interaktif, TMB pada umumnya ada fungsi sosial, kesehatan, ekologis, serapan air dan lainnya. Atau singkatnya TMB fungsi sosialnya ada tapi tidak melebihi fungsi ekologis itu sendiri, karena fungsi ruang terbuka hijau diutamakan
4. Proses program/kebijakan ini dari perumusan hingga terealisasi	Dimulai dengan musrenbang berjenjang dari tingkat RT,RW masuk ke tingkat kecamatan, Kota, Provinsi baru akan ditampung oleh dinas pertamanan dan kehutanan hasil rembuk tersebut, namun untuk suku dinas sudah bisa menampung sejak tahap rembuk kota. Hasil rembuk tersebut merupakan usulan dan masukan warga yang tidak tercantum dalam RPJMD yang tidak boleh diabaikan. Selanjutnya hal ini tercipta komunikasi politik antara eksekutif dan legislative untuk menetapkan prioritas kebutuhan baik yang tertuang dalam musrenbang, RPJMD, renstra dengan memperhatikan kemampuan anggaran sehingga pasti akan ada yang dikorbankan dari aspirasi tersebut. hal tersebut merupakan bahan sebuah kebijakan. Lalu di kami eksekutif sudah mulai dari musrenbang kemudian penyusunan rkpj kemudian dibahas lagi pagu/platform anggaran kemampuan daerah (pendapatan/pengeluaran) lalu dibahas di KUA PPAS setelah itu masuk ke RAPERDA
5. Besaran anggaran untuk pembangunan Taman Maju Bersama?	Kalau di kita jika ada sebuah program dinas wajib menuangkan dalam SKPD, untuk membuat kegiatan tahunan dasarnya RPJMD dituangkan kedalam renstra masing-masing dinas. Dari renstra kita melihat nih misalkan targetnya 86% dibagi 5 tahun, jika anggarannya dalam 5 tahun porsinya mencukupi maka akan ditambah. Tergantung kondisi anggaran pemerintah daerah. Seperti di 2018 kita membangun 7 taman, 2019 kita membangun 53 taman, 2020 stop, 2021 mulai bangun lagi 12 taman, 2022 kita bangun 31 taman. Selanjutnya tupoksi kami di ruang terbuka hijau dan alokasi anggaran terbesar ada pada pemeliharaan sampai 40% jauh lebih sulit merawat daripada membangun karena bisa sampai puluhan tahun oleh PJLP sebagai pemelihara. Pengadaan perkakas untuk penunjang pemeliharaan hampir 60%. Untuk pembangunan dan lainnya porsinya 10-20% karena harus membangun terus. Kecuali untuk pengadaan lahan porsinya akan sedikit bergeser karena anggaran cukup besar dan dinamis alokasi anggarannya. Upaya pengadaan lahan agar lebih menghemat anggaran dengan fasam dimana kewajiban pengembang dan dilimpahkan ke distamhut dan akan dipercepat pengalokasiannya
6. Perencanaan hingga terealisasi berapa banya Taman Maju Bersama terbangun dan apakah sudah mencapai target implementasi	Target pembangunan Taman Maju Bersama 86% di RPJMD dan sudah tercapai atau melampaui 100%. Bukan konsen ke pembangunan tapi penggunaan tamannya karena ada fungsi sosialnya yang lebih difokuskan, aktivasi masyarakat secara output dapat tapi outcome belum tentu. Diharapkan warga sekitar tidak hanya menggunakan juga memelihara, salah satunya dengan menjaga kebersihan dan keindahan
7. Pembangunan Taman Maju Bersama lebih banyak di wilayah Jakarta Timur	Pertama, memang lahan yang dimiliki banyak di timur dan selatan. Kedua, Jakarta itu utaranya sudah pantai dan daerah selatan berbatasan dengan bogor, lalu kita kontur tanah resapan air terbesar di selatan dan timur (timur agak selatan bukan utara) sehingga mengapa banyak taman di sekitar wilayah timur dan selatan. Jika dibangun RTH di wilayah lainnya secara

	<p>fungsi ekologis tidak tercapai namun untuk fungsi sosial berusaha dipenuhi, fungsi lainnya untuk menahan air yang masuk ke Jakarta serta kondisi tanah di Jakarta kebanyakan berpasir. Lalu jika diwilayah utara baru 30m saja sudah banyak airnya jadi tidak memungkinkan untuk pembangunan Taman Maju Bersama tersebut</p>
<p>8. kebijakan pembangunan Taman Maju Bersama termasuk kebijakan populis</p>	<p>Populis itu harus kalau menurut saya, karena setiap kepala daerah atau pemimpin harus membuat inovasi baru. Karena jika hanya melanjutkan program terdahulu tidak akan ada daya tariknya atau magnet ke masyarakat. untuk program TMB tergolong populis dengan inovasi kebijakan taman Gubernur Terdahulu dan itu harus ada. Untuk tiap gubernur saling berlomba beautifikasi daerahnya itu sendiri disamping pemenuhan kebutuhan masyarakat. dia punya janji politik tetapi dia juga harus sesuaikan dengan Rencana Jangka Panjang akan berkesinambungan dan tercapai tujuan pembangunan DKI Jakarta. Untuk antisipasi agar terus berkesinambungan disetiap SKPD teknis sesuai tupoksinya masing-masing harus memberikan arahan teknis terkait inovasi arahan Gubernur untuk tiap pembaruan kebijakan, untuk distamhut sendiri kami memiliki masterplan, bagaimana cara menata kota secara lanskap untuk 20tahun kedepan. Sehingga jika berbeda kepala daerahpun terkait arahan teknis secara umum kami sudah siap</p>
<p>9. program ini merupakan program yang diutamakan dalam periode kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan diberikan hak khusus tersendiri dalam APBN</p>	<p>Ya karena program ini masuk kedalam RPJMD harus dilaksanakan dalam periode Gubernur Anies Baswedan sehingga anggaran juga harus direalisasikan dalam APBD karena tertuang dalam RPJMD masuk kedalam 23 Janji Politik.</p>

**Dokumentasi**



**Dokumentasi saat penelitian bersama informan Ibu Hj. Yuke Yurike, ST., MM  
Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D Fraksi PDI-Perjuangan.  
Di kantor DPRD DKI Jakarta pada 19 Desember 2022**



**Dokumentasi saat penelitian bersama informan Bapak Feirully Irzal  
Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan  
BAPPEDA DKI Jakarta. Di kantor BAPPEDA DKI Jakarta  
pada 23 Desember 2022**



**Dokumentasi saat penelitian bersama informan Bapak Eko Cahyono  
Kepala Sub Koordinator Urusan Program dan Pelaporan Dinas Pertamanan dan  
Kehutanan DKI Jakarta. Di kantor Dinas Pertamanan dan Kehutanan  
pada 18 Januari 2023**



**Dokumentasi saat penelitian bersama informan Adnani Tahufiq S.Sos  
Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi C Fraksi Gerindra.  
Di kantor DPRD DKI Jakarta pada 5 Januari 2023**

**Daftar Riwayat Hidup Penulis**

Nama : Alya Yumna Budiono  
NIM : 193501516060  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 22 September 2000  
Agama : Islam  
No. Telepon : 087770114964  
Alamat : Jl. Kp. Pisangan II Rt.014/Rw.04 No.1  
Kec.Cakung Kel.Penggilingan Jakarta Timur  
Email : [Alyayumna22@gmail.com](mailto:Alyayumna22@gmail.com)  
Sosial Media : Instagram @Alyayumnab  
Linkedin Alya Yumna Budiono  
Pendidikan : SDN Malaka Jaya 05 Pagi  
SMP Negeri 168 Jakarta  
SMA Negeri 89 Jakarta  
Pengalaman Organisasi :

<b>Organisasi</b>	<b>Periode</b>	<b>Jabatan</b>
Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik	2020/2021	Sekretaris Divisi Bisnis Ekonomi dan Kreatif
Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik	2021/2022	Kepala Departemen Humas dan Kominfo

## SKRIPSI ALYA

### ORIGINALITY REPORT

<b>29%</b>	<b>28%</b>	<b>5%</b>	<b>13%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>data.jakarta.go.id</b> Internet Source	<b>5%</b>
<b>2</b>	<b>apbd.jakarta.go.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>jakarta.go.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>harisemesta.files.wordpress.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>repositori.usu.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>Submitted to Universitas Nasional</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>km.bappeda.jakarta.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>id.scribd.com</b> Internet Source	<b>1%</b>